

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim. Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Bachtiar Effendie. 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta. Penerbit Alumni.
- Boedi Harsono. 1971. *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya* Jilid I., Jakarta. Penerbit Djambalan.
- Effendi Perangin. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo.
- H.F.A Vollmar. 1996. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- H Riduan Syahrani. 2004. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta. Penerbit Alumni.
- Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Hukum). Yogyakarta. Penerbit Mirra Buana Media.
- Isharyanto. 2016. Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta. Penerbit WR.
- K. Wantjik Saleh. 1990. Hak AruJa Atas Tanah. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Marihot Pahala Siahaan. 2003. Bea Problem Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori Praktek. Jakarta. Penerbit Raja Grasindo Persada.
- Martin Basiang. 2009. *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing
- Philipus M. Hadjon. 1997. "tentang Wewenang". Penerbit YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – Desember

_____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya. Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media Grup.

P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.

Salim HS. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Kompas.

Soerjono Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermasa.

Sri Soedewi Masjhoen Sofyan. 1975. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.

Tijow, Kurnia Christy, Oktovian B. A. Sompie, Jack H. Ticoh. "*Analisis Potensi Likuifaksi Tanah Berdasarkan Data Standard Penetration Test (SPT) Studi Kasus : Dermaga Bitung, Sulawesi Utara*". Jurnal Sipil Statik Vol. 6 No.7 Juli 2018 (491-500) ISSN: 2337-6732.

Triwulan Titik Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana Prenamedia Group.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Gak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Amrin, R., Imantaka, A., Yanengga, E., & Maulida, G. 2022. Status Hukum Hak Atas Tanah yang Terkena Bencana Alam. Jurnal Tunas Agraria Vol 5(1). hal 65

- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Volume 01. Nomor 01. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.
- Meiske. 2022. Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Zona Merah Pemerintah Daerah Kota Palu. Jurnal Amanna Gappa. Universitas Hasanuddin.
- Nurhilma Lestari. 2020. Status Hak Atas Tanah Pasca Bencana Likuifaksi dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Palu.
- Riski Pardinata Berutu, et.all. 2023. Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Volume VI Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Sirat Handayani. 2021. Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea. Volume 4 Nomor 2.
- Syuhada. 2009. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahliwarisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan). Universitas Sumatra Utara Medan.
- Tiara Dwi Rahayu. 2023. Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah setelah Mengalami Likuefaksi Tanah. hal 255. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Volume 2, Nomor 2, April 2023

Tijow, Kurnia Christy, Oktovian B. A. Sompie, Jack H. TicoH. *“Analisis Potensi Likuifaksi Tanah Berdasarkan Data Standard Penetration Test (SPT) Studi Kasus : Dermaga Bitung, Sulawesi Utara”*. Jurnal Sipil Statik Vol. 6 No.7 Juli 2018 (491-500) ISSN: 2337-6732.

ARTIKEL

Moh Syafari Firdaus. 2021. Penyediaan Hunian Tetap dan Permasalahannya. hal 1

INTERNET

[Pahami Pasal 3 KUHPdata - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut \(uma.ac.id\)](http://uma.ac.id) diakses pada 17 September 2024 pukul 01.53

[Balai Harta Peninggalan \(BHP\): pengertian, Fungsi dan Jenis \(idntimes.com\)](http://idntimes.com) diakses pada 28/8/24 pukul 14.52

[Balai Harta Peninggalan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_harta_peninggalan) diakses pada 30/8/2024 pukul 15.00

<https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/walikota-berikan-target-bpbd-penyaluran-stimulan-tiga-bulan>

Moh Ridwan. 2021. <https://monitoring.skp-ham.org/program-relokasi-huntap-mandiri-di-palu-berbasis-partisipasi-warga/>

[Pencairan tanah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencairan_tanah) diakses pada 30/8/2024 pukul 16.20

[DITJEN AHU ONLINE - Profil - Sejarah Singkat](https://ditjenahum.kemlu.go.id/profil/sejarah-singkat) diakses pada 5/9/2024 pukul 15.00

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 75)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Surat Keputusan Gubernur Sulteng nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Sulteng